

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019**

Untuk Periode Yang Berakhir 31 DESEMBER 2019



**STASIUN KARANTINA PERTANIAN
KELAS II BANGKALAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 20 Kamal Bangkalan

Madura

Telp : 031-3012845

Email :skp.bangkalan@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bangkalan, 31 Desember 2019
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Agus Mugiyanto
AGUS MUGIYANTO SP.
NIP. 196902271992031002

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	6
I. Laporan Realisasi Anggaran	8
II. Neraca	9
III. Laporan Operasional	10
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	21
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	21
B.2. Belanja	22
B.3. Belanja Pegawai	23
B.4. Belanja Barang	24
B.5. Belanja Modal	25
B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25
B.5.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	26
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	27
C.1. Aset Lancar	27
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	27
C.1.2. Piutang Bukan Pajak	27
C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	27
C.1.4. Persediaan	28
C.2. Aset Tetap	30
C.2.1. Tanah	30
C.2.2. Peralatan dan Mesin	30
C.2.3. Gedung dan Bangunan	31
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	31
C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan	32
C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	32
C.4. Aset Lainnya	33
C.4.1. Aset Tak Berwujud	33
C.4.2. Aset Lain-lain	33
C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	34
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	35
C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga	35
C.5.2. Uang Muka dari KPPN	35
C.6. Ekuitas	35
C.6.1. Ekuitas	35
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	36

D.1.	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	36
D.2.	Beban Pegawai	37
D.3.	Beban Persediaan	37
D.4.	Beban Barang dan Jasa	38
D.5.	Beban Pemeliharaan	39
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	39
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	40
D.8.	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	40
D.9.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	41
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
E.1.	Ekuitas Awal	42
E.2.	Surplus/Defisit-LO	42
E.3.	Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	42
E.3.1.	Koreksi Nilai Persediaan	42
E.3.2.	Selisih Revaluasi Aset Tetap	42
E.4.	Transaksi Antar Entitas	42
E.4.1.	Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)	43
E.4.2.	Transfer Masuk/Transfer Keluar	43
E.5.	Ekuitas Akhir	44
F.	Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	44
F.1.	Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	44
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	44

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bangkalan, 31 Desember 2019
KUASA PENGGUNA ANGGARAN ,

AGUS MUGIYANTO.SP
NIP. 196902271992031002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 1.012.474.784 atau mencapai 126.55% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 800.000.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp 6.567.822.838,00 atau mencapai 99.63% dari alokasi anggaran sebesar Rp 6.592.042.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp Rp8.864.885.790,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp106.800.968,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp8.758.084.822,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp11.697.352,00 dan Rp8.853.188.438,00

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp933.024.585,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp5.843.649.075,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-4.910.624.490,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp62.690.154,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-4.847.934.336,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp8.274.874.160,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-4.847.934.336,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp5.568.302.704,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp8.853.188.438,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS II BANGKALAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019			31 Desember 2018
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	800.000.000,00	1.012.474.784,00	126.55	1.069.791.538
Jumlah Pendapatan		800.000.000,00	1.012.474.784,00	126.55	1.069.791.538
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	1.964.964.000,00	1.944.282.380,00	98.95	1.917.978.923
Belanja Barang	B.4.	3.281.088.000,00	3.279.975.458,00	99.97	2.772.830.321
Belanja Modal	B.5.	1.345.990.000,00	1.343.565.000,00	99.82	600.260.000
Jumlah Belanja		6.592.042.000,00	6.567.822.838,00	99.63	5.291.069.244

II. NERACA

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS II BANGKALAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	,00	0,00
Piutang Bukan Pajak	C.1.2.	,00	386.000,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.3.	,00	-1.930,00
Persediaan	C.1.4.	106.800.968,00	145.902.257,00
Jumlah Aset Lancar		106.800.968,00	146.286.327,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	1.254.692.000,00	1.254.692.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	3.804.658.072,00	3.974.658.072,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	6.839.153.000,00	5.770.625.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	227.328.500,00	98.033.500,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.5.	,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-3.367.746.750,00	-2.973.766.311,00
Jumlah Aset Tetap		8.758.084.822,00	8.124.242.261,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	8.000.000,00	8.000.000,00
Aset Lain-lain	C.4.2.	0,00	287.132.750,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3.	-8.000.000,00	-282.730.250,00
Jumlah Aset Lainnya		0,00	12.402.500,00
Jumlah Aset		8.864.885.790,00	8.282.931.088,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1.	11.697.352,00	8.056.928,00
Uang Muka dari KPPN	C.5.2.	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		11.697.352,00	8.056.928,00
Jumlah Kewajiban		11.697.352,00	8.056.928,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	8.853.188.438,00	8.274.874.160,00
Jumlah Ekuitas		8.853.188.438,00	8.274.874.160,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		8.864.885.790,00	8.282.931.088,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS II BANGKALAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER
2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	933.024.585	1,061,498,347.00
JUMLAH PENDAPATAN			1,061,498,347.00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	1.946.631.121	1,917,968,846.00
Beban Persediaan	D.3.	228.750.494	309,071,593.00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	1.703.080.977	1,504,711,146.00
Beban Pemeliharaan	D.5.	653.737.297	493,498,854.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	744.146.767	558,088,947.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	522.911.929	573,126,728.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8.	(1.930)	1.930
JUMLAH BEBAN		5.798.892.655	5,356,466,044.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(4.865.868.070)	(4,294,969.697)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	79.064.199,00	5,950,000.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	12.402.500,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	3.343.550,00	8,561,969
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	7.315.095,00	6.691.936.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		62.690.154,00	-6.096.987
SURPLUS/DEFISIT - LO		-4.847.934.336,00	-4.288.872.710

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS II BANGKALAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER
2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	30 September 2018
EKUITAS AWAL	E.1.	8.274.874.160,00	7.007.377.873,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-4.847.934.336,00	-4.288.872.710,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	-142.054.090,00	00,00
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1.	0,00	640.000,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.2.	-145.742.000,00	1.319.415.541,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.3.	3.687.910,00	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	5.568.302.704,00	4.236.313456,00
EKUITAS AKHIR	E.5.	8.853.188.438,00	8.274.874.160,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Karantina Pertanian, yang berada di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian. Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 22 / Permentan / OT.140 / 4 / 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis Karantina Pertanian. Pembentukan Stasiun Karantina Pertanian merupakan hasil reorganisasi di lingkungan Badan Karantina Pertanian yang merupakan perubahan nama dari Stasiun Karantina Hewan Kelas II Kamal.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Stasiun Karantina Pertanian Kelas II BAngkalan berkomitmen dengan visi “ mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui pembinaan akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.” Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati. Dalam melaksanakan tupoksinya Stasiun Karantina Pertanian berdasarkan pada landasan hukum Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan dan Peraturan Menteri Pertanian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan berkomitmen dengan visi “
Menjadi Stasiun Karantina Pertanian yang Tangguh dan Terpercaya dalam mempertahankan pulau Madura bebas dari HPHK dan OPTK tertentu ”

Untuk mewujudkan visi tersebut Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan melakukan beberapa langkah-langkah strategis mengacu pada rencana strategis Badan Karantina Pertanian antara lain :

1. Memperkuat kelembagaan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan
2. Membangun sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tupoksi di Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan
3. Mengembangkan SDM perkarantinaan yang profesional;
4. Mengembangkan sistem informasi dan publik awareness;
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan infrastruktur;

6. Mengembangkan manajemen pelayanan prima

Dalam tataran praktisnya,berbagai rencana strategis kegiatan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Melakukan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;
2. Melaksanakan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (*HPHK*) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (*OPTK*);
3. Melaksanakan pemantauan daerah sebar Hama Penyakit Hewan Karantina (*HPHK*) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (*OPTK*);
4. Melakukan pembuatan koleksi Hama Penyakit Hewan Karantina (*HPHK*) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (*OPTK*);
5. Melaksanakan pengawasan keamanan Hayati Hewani dan Nabati;
6. Melaksanakan pemberian pelayanan operasional Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan;
7. Melaksanakan pemberian pelayanan operasional pengawasan Keamanan Hayati Hewani dan Nabati;
8. Mengelola system informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan dan karantina tumbuhan;
9. Melaksanakan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Hewani dan Nabati;
10. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(6) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	635.000.000,00	770.000.000,00
Pendapatan Jasa Lainnya	15.000.000,00	30.000.000,00
Jumlah Pendapatan	650.000.000,00	800.000.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.733.955.000,00	1.814.960.000,00
Belanja Lembur	120.013.000,00	150.004.000,00
Belanja Barang Operasional	1.143.668.000,00	1.177.408.000,00
Belanja Barang Non Operasional	169.626.000,00	157.321.000,00
Belanja Barang Persediaan	193.100.000,00	192.671.000,00
Belanja Jasa	375.400.000,00	355.725.000,00
Belanja Pemeliharaan	673.506.000,00	653.395.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	650.788.000,00	744.568.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.215.118.000,00	1.215.118.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	130.872.000,00	130.872.000,00
Jumlah Belanja	6.406.046.000,00	6.592.042.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.012.474.784,00 atau mencapai 126.56% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp800.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0,00	79.616.619,00	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	30.000.000,00	59.940.000,00	199,80
Pendapatan Jasa Karantina dan Peternakan	770.000.000,00	872.918.165,00	113,36
Jumlah	800.000.000,00	1.012.474.784,00	126,56

Realisasi Pendapatan TA 2019 mengalami penurunan sebesar -5.66% dibandingkan TA 2018 di sebabkan terjadi penurunan frekwensi pengiriman hewan ternak ke luar pulau. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	79.616.619,00	6.502.420	91,83
Pendapatan Jasa Lainnya	59.940.000,00	33.560.000	44,01
Pendapatan Jasa Karantina dan Peternakan	872.918.165	1.029.729.052	-17,96
Pendapatan Lain-lain	0	66	#DIV/0!
Jumlah	1.012.474.784,00	1.069.791.538	-5,66

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp.6.567.822.838,00 atau 99.63,% dari anggaran belanja sebesar Rp6.592.042.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2019

Uraian Akun Belanja	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	1.964.964.000,00	1.944.283.984,00	98.95
Belanja Barang	3.281.088.000,00	3.279.975.458,00	99.97
Belanja Modal	1.345.990.000,00	1.343.565.000,00	99.82
Total Belanja Kotor	6.592.042.000,00	6.567.824.442,00	99.63
Pengembalian Belanja		(1.604,00)	0.00
Total Belanja	6.592.042.000,00	6.567.822.838,00	99.63

Dibandingkan dengan 31 Desember 2018, Realisasi Belanja 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 19.44% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Terdapat Kenaikan Pagu Belanja Barang dan Belanja Modal di TA.2019

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Belanja Pegawai	1.944.282.380,00	1.917.979.378,00	1,35
Belanja Barang	3.279.975.458,00	2.772.830.321,00	15,46
Belanja Modal	1.343.565.000,00	600.260.000,00	55,32
Total Belanja	6.567.822.838,00	5.291.069.699,00	19,44

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.1,944,283,984,00 dan Rp 1.917.979.378. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang yang

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 1.35% dari 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Terdapat Penambahan Pegawai Baru dan Mutasi Dari UPT Lain di Tahun 2019

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.794.304.984,00	1.797.996.378	-0,21
Belanja Lembur	149.979.000,00	119.983.000	20,00
Jumlah Belanja Kotor	1.944.283.984,00	1.917.979.378	1,35
Pengembalian Belanja Pegawai	-1.604,00	-455	71,63
Jumlah Belanja	1.944.282.380,00	1.917.978.923	1,35

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.279.975.458,00 dan Rp 2.772.830.321,00. Realisasi belanja barang Per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 15.46% dari 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Meningkatnya belanja perjalanan di TA.2019

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.197.489.934	1.096.684.344	8,42
Belanja Barang Non Operasional	156.936.200	159.030.000	-1,33
Belanja Barang Persediaan	180.666.100	237.204.100	-31,29
Belanja Jasa	347.363.160	228.324.076	34,27
Belanja Pemeliharaan	653.373.297	493.498.854	24,47
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	744.146.767	558.088.947	25,00
Jumlah Belanja Kotor	3.279.975.458	2.772.830.321	15,46
Pengembalian Belanja Barang	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja	3.279.975.458	2.772.830.321	15,46

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar 1,343,565,000,00 dan Rp 545.760.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2019 mengalami Kenaikan sebesar 55.32% dibandingkan per 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Terdapat Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Jalan ,Irigasi dan Jaringan di TA.2019

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	545.760.000	#DIV/0!
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.214.365.000	26.800.000	97,79
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	129.200.000	27.700.000	78,56
Jumlah Belanja Kotor	1.343.565.000	600.260.000	55,32
Pengembalian Belanja	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja	1.343.565.000	600.260.000	55,32

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 1.214.365.000,00 dan Rp 26.800.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 97.79% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Karena TA.2019 Terdapat Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa instalasi Karantina Hewan

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.214.365.000	26.800.000	97,79
Jumlah Belanja Kotor	1.214.365.000	26.800.000	97,79
Pengembalian Belanja	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja	1.214.365.000	26.800.000	97,79

B.5.3. BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp129.200.000,00 dan Rp27.700.000,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 78.56% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Karena TA.2019 Terdapat Pemasangan Paving Di Halaman Kantor Wilker dan Rumah dinas

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 September 2019	Realisasi 30 September 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	129.200.000,00	27.700.000,00	78,56
Jumlah Belanja Kotor	129.200.000,00	27.700.000,00	78,56
Pengembalian Belanja	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja	129.200.000,00	27.700.000,00	78,56

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2019

Uraian	30 September 2019
Uang Tunai di Brankas Rp. 00, DI REK BANK RP. 00 KWITANSI UP. RP.00	0,00
Jumlah	0,00

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp00 dan Rp386.000,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	,00	386.000,00
Jumlah	,00	386.000,00

C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-,00 dan Rp-1.930,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang

masing-masing debitor. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0,00	0,5%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00

C.1.4. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp106.800.968,00 dan Rp145.902.257,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Barang Konsumsi	106.800.968,00	145.902.257,00
Jumlah	106.800.968,00	145.902.257,00

dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Nilai Persediaan per 31 Desember 2018	145.902.257
Mutasi Tambah	194.875.335
Pembelian	180.666.100
Tranfer Masuk	13.555.250
Koreksi penyesuaian nilai persediaan	653.985
Saldo Awal	0
Koreksi Tambah	0
Mutasi Kurang	233.976.624
Barang usang	4.625.530
Penggunaan /pemakaian	228.750.494
Koreksi kurang	0
Tranfer Keluar	600.600
Saldo nilai Persediaan per 31 Desember 2019	106.800.968

Mutasi Tambah

1. Pembelian sebesar Rp. 180.666.100 berasal dari belanja 521811 selama januari s-d Desember 2019 berupa ATK, Bahan LAB, Bahan Perlakuan dan Dokumen Pendukung Tindak Karantina Hewan dan Tumbuhan .
2. Tranfer masuk sebesar Rp. 13,555,250 dari Badan Karantina Pertanian merupakan Formulir Utama Tindak Karantina hewan dan Tumbuhan sesuai BA/Surat Pengantar :
 - a. No. 13/SP-04/2019, 62/SP-04/2019 Tanggal 01 APRIL 2019
 - b. No.44/SP-KH/02/2019 TANGGAL 26 FEB 2019
 - c. No.158/SP-06/2019 Tanggal 25 JUNI 2019
 - d. No.250/SP-10/2019 Tanggal 15 Oktober 2019
3. Koreksi penyesuaian nilai persediaan sebesar Rp. 653.985 yang terdiri dari ATK dan Bahan Lab.

Mutasi Kurang :

1. Pemakaian/Penggunaan Sebesar RP. 228.750.494,-
2. Tranfer Keluar sebesar Rp. 600.600 merupakan Formulir Utama KH ke BBKP Surabaya Sesuai BA :
 - a. No : 339.A/SP-KH/K.55.E/06/2019 Tanggal 17 JUNI 2019
3. Barang usangn sebesar Rp. 4.625.530

Penambahan aset persediaan terkait belanja barang persediaan

URAIAN	NILAI
Belanja Persediaan	
521811	180.666.100
Penambahan aset persediaan terkait belanja persediaan	
pembelian	180.666.100
selisih	-

Tidak Terdapat selisih antara belanja bahan persediaan dengan penambahan aset persediaan terkait belanja persediaan.

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.254.692.000,00 dan Rp1.254.692.000,00.

Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai
1.	564,00m2	Kusuma Bangsa Rt.1, Kamal	518.034.000
	200,00m2	Branta - Pademawu - Pamekasan Rt., Pademawu	125.978.000
3.	406,00m2	Arjasa - Kangean - Sumenep Rt.1, Arjasa	239.439.000
4.	468,00m2	Kusuma Bangsa - Kamal - Bangkalan Rt.-, Kamal	371.241.000
Jumlah			1.254.692.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.804.658.072,00 dan Rp3.974.658.072,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	3.974.658.072,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-170.000.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	3.804.658.072,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-2.992.285.881,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	812.372.191,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Untuk mutasi Tambah TA.2019 Tidak ada
2. Untuk Mutasi Kurang Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya berupa Kendaraan Operasional Roda-4

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.839.153.000,00 dan Rp5.770.625.000,00..

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	5.770.625.000,00
Mutasi Tambah	1.214.365.000,00
Pembelian (Penyelesaian Pembangunan dengan KDP)	1.214.365.000,00
Mutasi Kurang	0
Koreksi Kesalahan input IP	-145.837.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	6.839.153.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-337.797.938
Nilai Buku per 31 Desember 2019	6.501.355.062

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp227.328.500,00 dan Rp98.033.500,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	98.033.500,00
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	129.200.000,00
Koreksi Kesalahan input IP	95.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	227.328.500,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-23.554.193,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	203.774.307,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah berupa:

Mutasi Penambahan Berupa :

- Pemasangan Paving Stone di Wilker Suramadu dan Rumah Dinas
- Koreksi Revaluasi IP

Penambahan Aset jalan, Irigasi dan Jaringan Terkait Belanja Modal JIJ

URAIAN	NILAI
Belanja JIJ	129.200.000
534111	129.200.000
Penambahan aset GB terkait belanja GB	129.200.000
pembelian / Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	129.200.000
Selisih	0

C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp0,00. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-3.367.746.750,00 dan Rp-2.973.766.311,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	3.804.658.072,00	-2.992.285.881,00	812.372.191,00
2.	Gedung dan Bangunan	6.839.153.000,00	-337.797.938,00	6.501.355.062,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	227.328.500,00	-23.554.193,00	203.774.307,00
Akumulasi Penyusutan		10.871.139.572,00	-3.367.746.750,00	7.503.392.822,00

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp8.000.000,00 dan Rp8.000.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	8.000.000,00
Jumlah	8.000.000,00

C.4.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp287.132.750,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	287.132.750,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	170.000.000,00
Mutasi Kurang	
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	-457.132.750,00
Saldo per 31 desember 2019	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 desember 2019	0,00
Nilai Buku per 31 desember 2019	0,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa:

Mutasi penambahan Berupa :

Penghentian aset dari penggunaannya berupa kendaraan Operasional Roda-4

Mutasi Kurang berupa :

Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan) berupa Penghapusan BMN Sesuai Risalah lelang No.66/49/2019 Tanggal 02-04-2019 dan 201/49/2019 23-09-2019 dengan rincian barang :

Station Wagon	-1	Unit
Sepeda Motor	-2	Unit
PH Meter (Alat Ukur Universal)	-2	Buah
Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	-1	Buah
Kursi Besi/Metal	-3	Buah
Lemari Es	-2	Buah
A.C. Split	-1	Buah
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-1	unit
Uninterruptible Power Supply (UPS)	-2	Buah
Facsimile	-2	Buah
Genset	-1	Buah
Automatic Micro Plate Laser	-1	Buah

Elisa Reader	-1	Buah
Printer (Peralatan Personal Komputer)	-4	Buah

C.4.3. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan per 31 desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-8.000.000,00 dan Rp-282.730.250,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 desember 2019, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp11.697.352,00 dan Rp8.056.928,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 desember 2019	31 Desember 2018
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	2.768.072,00	419.331,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	8.929.280,00	7.637.597,00
Jumlah	11.697.352,00	8.056.928,00

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp8.853.188.438,00 dan Rp8.274.874.160,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 desember 2019 dan 31 desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp933.024.585,00 dan Rp1.061.494.347,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 desember 2019 dan 31 desember 2018

Uraian	Realisasi 31 desember 2019	Realisasi 31 desember 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	872.532.165,00	1.027.385.927	-17,75
Pendapatan Jasa Lainnya	59.940.000,00	33.560.000	44,01
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	552.420,00	552.420	0,00

Pendapatan tersebut berasal dari pendapatan fungsional berupa Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan, Jasa Lainnya berupa Transport/Perjalanan Tindak Karantina dan pendapatan sewa berupa sewa rumah dinas yang di tempati kepala kantor.

PENJELASAN PENDAPATAN DI- LRA DAN DI-LO

PENJELASAN SELISI PENDAPATAN DI LRA DAN PENDAPATAN LO	
LRA (OPERASIONAL)	
Pendapatan Jasa Karantina dan Peternakan	872.918.165
Jasa Lainnya (Perjalanan Tindak Karantina)	59.940.000
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	552.420
Jumlah	933.410.585
LO (OPERASIONAL)	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	552.420
Pendapatan Jasa Karantina dan Peternakan	872.532.165
Jasa Lainnya (Perjalanan Tindak Karantina)	59.940.000
Jumlah	933.024.585
Selisih (Jumlah Pendapatan LRA - Jumlah Pendapatan di LO)	386.000
selisih tersebut merupakan Piutang Tahun Anggaran yang lalu	386.000
Piutang Periode Sem.II 2019 di Neraca	-

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.946.631.121,00 dan Rp.1.917.968.846. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 desember 2019	Realisasi 31 desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.180.862.680,00	1.176.774.300	0,35
Beban Pembulatan Gaji PNS	19.830,00	19.248	3,02
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	106.398.870,00	104.772.640	1,55
Beban Tunj. Anak PNS	36.342.502,00	34.192.402	6,29
Beban Tunj. Struktural PNS	11.900.000,00	11.900.000	0,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	163.800.000,00	171.450.000	-4,46
Beban Tunj. PPh PNS	3.408.479,00	2.228.136	52,97
Beban Tunj. Beras PNS	78.068.760,00	78.648.120	-0,74
Beban Uang Makan PNS	197.186.000,00	202.271.000	-2,51
Beban Tunjangan Umum PNS	18.665.000,00	15.730.000	18,66
Beban Uang Lembur	149.979.000,00	119.983.000	25,00
Jumlah	1.946.631.121,00	1.917.968.846,00	1,49

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 228.750.494,00 dan Rp. 309.071.593. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	228.750.494,00	309.071.593	-25,98
Jumlah	228.750.494,00	309.071.593	-25,98

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 desember 2019 dan 31 desember 2018 adalah masing-masing sebesar 1.703.080.977,00 dan Rp. 1.495.070.762. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 desember 2019 dan 31 desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 desember 2019 dan 31 desember 2018

Uraian	Realisasi 31 desember 2019	Realisasi 31 desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	969.917.989,00	872.598.223	11,15
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	90.288.000,00	75.240.000	20,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8.953.947,00	5.825.900	53,69
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	127.680.000,00	143.040.000	-10,74
Beban Bahan	130.686.200,00	127.780.000	2,27
Beban Honor Output Kegiatan	26.250.000,00	27.250.000	-3,67
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0,00	4.000.000	-100,00
Beban Langganan Listrik	124.417.618,00	77.141.578	61,28
Beban Langganan Telepon	3.754.823,00	8.649.853	-56,59
Beban Langganan Air	5.893.604,00	4.566.385	29,06
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	19.306.816,00	19.306.816	0,00
Beban Sewa	18.956.980,00	15.556.980,00	21,86
Beban Jasa Profesi	26.600.000,00	22.300.000	19,28
Beban Jasa Lainnya	150.375.000,00	92.888.627	61,89
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan	0,00	-1.073.600	-100,00
Jumlah	1.703.080.977,00	1.495.070.762,00	13,91

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 desember 2019 dan 31 desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp653.373.297,00 dan Rp. 520.298.854,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 desember 2019 dan 31 desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 desember 2019 dan per 31 desember 2018

Uraian	Realisasi 31 desember 2019	Realisasi 31 desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	287.499.500,00	170.000.000	69,12
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	63.000.000,00	13.500.000	366,67
Beban Pemeliharaan Jaringan	8.377.000,00	5.000.000	67,54
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	294.496.797,00	304.998.854	-3,44
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	26.800.000	0,00
Jumlah	653.373.297,00	520.298.854,00	25,58

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 desember 2019 dan 31 desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp744.146.767,00 dan Rp. 558.088.947. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 desember 2019 dan 31 desember 2018 adalah sebagai berikut

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 desember 2019 dan per 31 desember 2018

Uraian	Realisasi 31 desember 2019	Realisasi 31 desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	270.718.002,00	184.175.756	46,99
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	58.014.000,00	67.075.000	-13,51
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	59.290.000,00	10.550.000	461,99
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	330.624.765,00	279.018.191	18,50
Beban Perjalanan Tetap	25.500.000,00	17.270.000	47,65
Jumlah	744.146.767,00	558.088.947,00	33,34

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 desember 2019 dan 31 desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp567.668.349,00 dan Rp.573.126.728. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk pada 31 desember 2019 dan 31 desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 desember 2019 dan per 31 desember 2018

Uraian	Realisasi 31 desember 2019	Realisasi 31 desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	199.031.784,00	142.247.516,00	39,92
Beban Penyusutan Irigasi	650.574,00	534.772,00	21,65
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	12.920.000,00	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Jaringan	1.946.836,00	1.946.836,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	12.142.857,00	2.480.500,00	389,53
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	340.976.298,00	425.917.104,00	-19,94
Jumlah	567.668.349,00	573.126.728,00	-0,95

D.8 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 desember 2019 dan per 31 desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-12.402.500,00	0,00	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-2.689.565,00	-6.057.796,00	-55,60
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	-4.625.530,00	-2.357.186,00	96,23
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	3.343.550,00	8.561.903,00	-60,95
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	79.064.199,00	5.950.000,00	1.228,81
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	66,00	-100,00
Jumlah	62.690.154,00	6.096.987,00	928,22

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp8.274.874.160,00 dan Rp7.077.377.873,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp-4.847.934.336,00 dan -4.288.872.710. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-142.054.090,00 dan Rp1.320.055.541,00.

E.3.1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp640.000,00.

E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-145.742.000,00 dan Rp1.319.415.541,00. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2019.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Gedung dan Bangunan	-145.837.000,00
Irigasi	95.000,00
Jumlah	-145.742.000,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.568.302.704,00 dan Rp. 4.236.313.456,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 30 September 2019
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.567.822.838,00
Diterima dari Entitas Lain	-1.012.474.784,00
Transfer Keluar	-600.600,00
Transfer Masuk	13.555.250,00
Jumlah	5.568.302.704,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2019 saldo DDEL adalah sebesar Rp-1.012.474.784 sedangkan DKEL sebesar Rp.6.567.822.838,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp13.555.250,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2019.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Barang Konsumsi	018120199412110000KP	13.555.250,00
Jumlah			13.555.250,00

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp-600.600,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Keluar per 31 Desember 2019.

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1.	Barang Konsumsi	018120500237483000KD	-600.600,00
Jumlah			-600.600,00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp8.853.188.438,00 dan Rp8.274.874.160,00

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

F.2. Pengungkapan Lain-lain

- a. Terdapat Revisi Dipa Sebanyak 6 kali
 - Revisi 1 tanggal 27 juni 2019
 - Revisi 2 tanggal 14 agustus 2019
 - Revisi 3 tanggal 28 agustus 2019
 - Revisi 4 Tanggal 16 september 2019
 - Revisi 5 Tanggal 21 Oktober 2019
 - Revisi 6 Tanggal 27 November 2019

b. Pengelola Keuangan :

- Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK : Agus Mugiyanto.SP
- Penandatanganan SPM : M.SHOLAHUDDIN.SH
- Bendahara Pengeluaran : Toni Kriswantoro.SE
- No Rek.Bendahara Pengeluaran 140-009905137-8 Bank Mandiri cabang Pel.Tanjung Perak

c. Utang Kepada Pihak Ketiga tersebut berupa :

- Kekurangan Pembayaran gaji An.drh.Heli Afiantoro W sudah di bayar tanggal 09 Januari 2020 sesuai dengan SP2D Nomor **201351303000039**.
- Tagihan Listrik Desember 2019 sudah dibayar pada tanggal 13 Januari 2020
- Tagihan Internet Desember 2019 sudah dibayar pada tanggal 13 Januari 2020
- Tagihan Telpon Desember 2019 sudah dibayar pada tanggal 13 Januari 2020
- Tagihan Air PDAM Desember 2019 sudah dibayar pada Tanggal 13 Januari 2020

